

**INOVASI MCC DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH:**

**MARSIVS IRPANUS U.D**

**NIM. 2019210117**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2023**

## **INOVASI MCC DI KOTA MALANG**

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. WillyTri Hardianto,MM.,M.AP**

**Dosen Pembimbing Kedua : Firman Firdausi S.H., M.H**

### **RINGKASAN**

Dengan penelitian ini akan diputuskan Mcc Advancement di kota Malang. MCC adalah semacam pengembangan yang menawarkan platform bagi pelaku keuangan kreatif sebagai cara untuk mengakui pertumbuhan di kota Malang yang kaya budaya. Melalui pengembangan ini, warga Kota Malang dengan kebutuhan unik dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian. Perhatian pemerintah termasuk peraturan, yang berfungsi sebagai kredensial bagi mereka yang membutuhkan pembangunan. Kekhawatiran bagaimana melaksanakan Pembangunan Mcc di Kota Malang. Taktik eksplorasi ini menggunakan teknik menarik yang bersifat subyektif. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini meliputi data wajib dan tambahan. Pertemuan, persepsi, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Proses "pemeriksaan bola salju" melibatkan belanja saksi. Taktik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pemeriksaan informasi meliputi pengumpulan informasi, pengurangan informasi, tampilan informasi, dan pengambilan keputusan. Temuan investigasi ini menunjukkan bahwa Pembangunan Mcc Kota Malang dilihat dari kelebihan, kesesuaian, kompleksitas, dan plausibility yang dilakukan. Adanya dukungan dari lingkungan dalam hal faktor pendukung. Unsur pembatasnya adalah sebagian masyarakat masih kurang perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan pertumbuhan MCC ini.

**Kata Kunci:** Inovasi Mcc, Mcc

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manajemen otoritas publik adalah tugas asosiasi. Pertumbuhannya tentu sudah berlangsung lama, diawali dengan perusahaan yang memberikan pelayanan tetapi tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Baru-baru ini, asosiasi manajemen kebijakan terus membangun organisasi baru yang terbuka, beberapa di antaranya terkadang berhasil. Ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan dukungan masyarakat lebih lanjut. Langkah pertama adalah mempraktikkan strategi baru, yang memerlukan penyesuaian pada pengaturan baru sehingga orang menganggapnya menarik.

Misalnya, agribisnis besar dan petani mungkin diremehkan, begitu pula minoritas lainnya seperti petani, profesional yang tertekan, dan sumber daya politik dan keuangan. Pakar yang benar-benar terbuka dengan sengaja menjaga jarak satu sama lain dengan menempatkan kepercayaan mereka pada struktur yang terorganisir dengan baik dan andal. Bantuan dari dalam organisasi dianggap tidak efektif dalam pengembangan ini, sehingga pembaruan yang dikenal sebagai Organisasi Terbuka Baru dibuat sebagai struktur panduan yang mencoba juga membina organisasi yang tidak melayani populasi umum menggunakan pemikiran relatif melalui sistem rahasia ( Alamsyah, 2016). Revitalisasi Organisasi Terbuka Baru hanya untuk sektor swasta, yang bertentangan dengan standar nilai. terutama keputusan untuk menggunakan manajemen kebijakan asosiasi yang sangat baik. Akibatnya, pertumbuhan dalam manajemen kebijakan memberi jalan kepada

Bantuan Publik Lainnya, yang bergantung pada pengakuan warga dan merupakan prasyarat penting bagi organisasi dengan reputasi sukses (Alamsyah, 2016).

Bantuan Umum Lainnya, perkembangan baru dalam manajemen kebijakan, dan Organisasi Terbuka Baru semuanya melakukan upaya yang konsisten untuk tetap up to date dengan peristiwa terkini memungkinkan untuk menyebutkan kemajuan saat mereka hadir. Misalnya, di era kemajuan 4.0 saat ini, sebuah asosiasi tertentu mencari sistem praktis dengan teknologi elektronik palsu dengan bantuan internet, tetapi juga periode pengenalan organisasi administrasi.

Administrasi manajemen kebijakan sebagai kemampuan mendasar dari sebuah organisasi bagaimanapun juga merupakan subjek yang mendapatkan pengawasan yang sangat tinggi mengingat berbagai keprihatinan yang diungkapkan oleh banyak penduduk setempat tentang pengawasan pelaksanaan kebijakan. Sebab, hampir setiap daerah akan bersinergi dengan manajemen kebijakan yang diberikan oleh kelompok pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Kedua kelompok yang mengenal manajemen kebijakan dan kelompok organisasi pemerintah yang menggunakan strategi paling populer untuk mengawasi manajemen kebijakan akan terus melakukan diskusi serius tentang pengawasan manajemen kebijakan. Ketika manajemen kebijakan ditangani oleh lembaga administratif, karakteristik umum ini terjadi.

Referensi Kata Besar Bahasa Indonesia dengan jelas mengkaji kebutuhan organisasi; juga, bantuan adalah tugas untuk membantu administrator mengatur apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Menurut Oxford (2000), organisasi saat ini adalah

struktur yang menyediakan kebutuhan masyarakat umum dan secara signifikan dipengaruhi oleh lembaga pemerintah atau perusahaan swasta.

Menurut Gronross (1990, 27), organisasi adalah perkembangan atau rangkaian kegiatan yang tidak dapat dilihat (tidak dapat dihubungi) yang dapat terjadi karena hubungan antara bagian pembelian yang membutuhkan organisasi dan spesialis yang menawarkan bantuan atau hal lain. diberikan oleh administrator," pernyataan ini agak benar.

Jenis implementasi kebijakan yang bergantung pada otoritas publik untuk memberikan bantuan publik kepada daerah dan daerah untuk memenuhi kebutuhan berbagai organisasi publik juga berbeda, selain perbedaan pengelolaan kebijakan. Istilah organisasi, yang berarti melayani, adalah akar kata dari organisasi. Komponen organisasi pemerintah melengkapi strategi, kebijakan, dan manajemen. Rauf (2012, 16) menyatakan bahwa kategori bantuan publik berikut umumnya termasuk:

1. Pelayanan Internal
2. Pelayanan Eksternal

Skelcher dalam Suptianto (2009; 308) menunjukkan bahwa membagi administrasi publik menjadi dua bagian, yaitu inside customer dan outside client, merupakan pedoman dasar berkenaan dengan inner dan outward aid ini. Komunitas lokal sebagai mitra biasanya diprioritaskan di atas pelanggan eksternal lainnya di masyarakat. Tidak hanya dikoordinir oleh klien eksternal tetapi juga tidak ditetapkan secara tegas oleh klien internal dalam hal membangun kualitas administrasi.

Kemampuan lembaga pengatur otoritas publik untuk memberikan dukungan publik berarti bahwa semua jenis kebutuhan organisasi pemerintah sebagai elemen internal yayasan pemerintah akan terpenuhi, memungkinkan untuk penyelesaian aparatur internal pemerintah serta administrasi terbuka.

Area lokal adalah komponen yang berada di luar pengaturan organisasi khusus, mirip dengan area lokal, dan merupakan sarana dimana koperasi profesional melayani kebutuhan yang disediakan untuk area lokal dan pelanggan.

Menurut Rahma dalam buku harian *Government Change* (2010; 17), administrasi publik yang seharusnya disediakan oleh Mahmudi (2005; 229) dapat dibagi menjadi dua kategori dasar, khususnya administrasi kebutuhan esensial (mencakup kesejahteraan, pendidikan esensial, dan kebutuhan esensial masyarakat), serta administrasi publik yang terdiri dari administrasi regulasi, tenaga kerja, dan administrasi produk. Berdasarkan evaluasi yang disajikan di atas, secara umum diyakini bahwa administrasi publik dapat dibagi menjadi dua kelas:

- 1 Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.
- 2 Layanan publik yang bersifat administratif, baik, dan terkait layanan semuanya termasuk.

Dengan demikian, kedua jenis bantuan publik tersebut sama-sama dibutuhkan oleh bagian penyusun masyarakat (masyarakat umum), baik administrasi publik yang berfungsi sebagai kebutuhan dasar manusia maupun administrasi terbuka dalam struktur umum, dan otoritas publik sebagai bagian dari organisasi negara juga dituntut untuk memenuhi keduanya. Penyelenggaraan

administrasi negara mengikuti kemampuan badan publik yang secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk melindungi dan melayani seluruh warga negara. Menurut Tahir dalam jurnal *Government Change* (2010; 1), “Bantuan publik adalah salah satu usaha utama yang diperlukan untuk ekspres yang melengkapi kapasitas pemerintah,” bantuan publik umumnya merupakan salah satu tanggung jawab otoritas publik terhadap setiap kerabatnya. Misi tersebut telah dituangkan secara jelas dalam pengantar alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat 2 (dua) komponen penyelenggaraan utama alat itu untuk rakyat pada umumnya, dan pada khususnya;

- a. Meningkatkan dukungan pemerintah secara keseluruhan
- b. Mengingat perdamaian abadi dan hak-hak sipil, mengajar tentang sejarah bangsa dan berpartisipasi dalam inisiatif global adalah penting.

Kurangnya pertimbangan dan realita dari instansi pemerintah dalam tindakan koordinasi administrasi publik yang dilakukan oleh komponen otoritas publik sebagai penyelenggaraan administrasi publik yang dilakukan oleh komponen otoritas publik selama ini, sebagaimana dikemukakan oleh Suprianto (2009; 310) bahwa: secara praktis sampai saat ini komponen otoritas publik sebagai pelaksana administrasi publik

Administrasi publik mengikuti siklus yang dilakukan secara bertahap, dan kontak dukungan bahkan telah dikontrol secara eksplisit oleh aturan hukum substantif. Bantuan publik di Indonesia. Setiap dinas yang memberikan berbagai bentuk bantuan kepada daerah juga telah menyusun Asas Fungsi Administrasi

(SOP) sebagai pengembangan interaksi atau tahapan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada daerah sebagai acuan yang sangat penting.

Karena jenis administrasi yang diberikan berbeda, maka setiap organisasi administrasi akan membuat pedoman fungsional bantuannya sendiri. Walaupun pedoman tersebut akan berbeda satu sama lain, namun harus tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan, khususnya Pedoman Perubahan Kewenangan Ulama dan Perubahan Peraturan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Aturan Baku Undang-Undang Perbantuan.

Dalam pendekatan ini, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan individu daripada kepentingan kelompok dalam menjalankan tugasnya. Ada kepercayaan dalam memberikan berbagai bentuk bantuan, serta kepastian biaya dan hasil administrasi. Ada pula keselarasan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh daerah. Administrasi publik harus dilakukan secara ahli oleh organisasi otoritas publik, dan saat ini dimungkinkan untuk membuka pintu bagi masyarakat umum dan sektor swasta untuk membantu administrasi publik.

Norma adalah informasi khusus atau sesuatu yang telah dinormalkan sebagai tolak ukur dalam melakukan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan administrasi terbuka, sehingga masyarakat merasa puas dalam pendampingan. Administrasi publik diberikan berdasarkan pedoman khusus kepada daerah sebagai komponen yang menerima hasil penyelenggaraan administrasi publik tersebut.



Lebih disukai jika ada beberapa, yang menunjukkan bahwa kontribusi administrasi publik melebihi harapan atau bahwa proses penerimaan bantuan publik memenuhi harapan yang tidak terduga. Lingkungan akan cukup senang dengan dukungan yang diterima, seandainya dilakukan dalam bantuan. Akibatnya, seringkali terlihat bahwa kepuasan masyarakat lokal dalam menerima pelayanan publik sangat tergantung pada dukungan yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat, nampaknya otoritas publik belum sepenuhnya melaksanakannya dengan baik. Masih terbukti bahwa banyak otoritas yang memberikan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat tidak memiliki sedikitpun gagasan tentang betapa pentingnya administrasi publik bagi berbagai aspek masyarakat atau mungkin memiliki kemampuan untuk memberikan jenis bantuan yang sangat baik. Ini mengarah pada pertanyaan apakah bentuk layanan terkait dengan kemampuan organisasi khusus untuk memenuhi persyaratan bantuan, dan diakhiri dengan gagasan bahwa pelanggan secara konsisten menjadi penerima manfaat dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Malang Innovative Culture Mood adalah tagline untuk Imaginative Jog (Mcc), yang memiliki posisi menonjol sebagai fokus dari setiap kegiatan pelaku industri kreatif yang bertujuan untuk terlibat dan menciptakan SDM (HR) dengan semua kantor tamu yang disediakan. Setiap bidang keuangan kreatif dikembangkan secara merata, memungkinkan perusahaan kreatif tumbuh secara finansial di era mutakhir tanpa mengabaikan masyarakat sebagai sumber daya dan warisan yang berharga. Pelaku ekonomi imajinatif dapat berkumpul di Malang Imaginative Center (Mcc)

untuk berkolaborasi dan meningkatkan ekonomi lokal di Kota Malang. Otoritas publik berkeyakinan bahwa kehadiran MCC akan sangat memudahkan kerja para entertainer finansial kreatif. Belakangan ini penataan administrasi publik terus berkembang menjadi lebih baik dan sukses, oleh karena itu menggarap administrasi terbuka menjadi penting.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan tersebut dijabarkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa baik Pembangunan MCC Kota Malang dilaksanakan?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pembangunan MCC di Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menemukan, menciptakan, atau menguji kebenaran pengetahuan adalah tujuan dari penelitian. Untuk menentukan cara menggunakan pengembangan MCC, pertimbangkan hal berikut:

1. Untuk menentukan bagaimana Kota Malang akan menggunakan uang muka MCC.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kemajuan PKS di Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, Investigasi ini merupakan salah satu bidang fokus keilmuan pemerintah terkait pembangunan daerah, sekaligus komitmen informasi kepada pembaca yang perlu memahami perkembangan MCC di Kota Malang.

2. Secara praktis, Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bahan renungan bagi Jog Imajinatif Malang dan masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan disana, serta menjadi sumber informasi untuk pendalaman ilmu administrasi publik lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afifudin, B.S.A., & Saebani, B.A.2018. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Carta, Maurizio.2008. *Creative City: Dynamics, Inovations, Actions. Palermo: Università degli Studi di Palermo.*Creswell, John.*Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayat.2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilda, N. 2014. *Srategi Inovasi Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Peayanan di Kantor pertahanan Surabaya II*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lele Arief, Muhtosim. Olson dan Dover 2007. *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan*. Banyumedia publishing. Brawijaya Press.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017. *Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Peraturan Pemerintah*. Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. *Tentang Pelayanan Perizinan Usaha terintergrasi Secara Elektronik*,
- Slamet, dkk. 2017. Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*.Wanna, John. 2008. Collaborative government: meanings, dimensions, driversand coutcomes. Canberra: AustralianNational University E Press.Zuhal. 2013. Gelombang ekonomi inovasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, P. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, 2006. *Prinsip – prinsip Total Quality service*, Yogyakarta: andi Kholer.

Arief 2007. *Manajemen pemasaran, edisi II Jilid 1 dan 2 Pemasaran*, Jakarta: PT.Indeks, Jakarta.

Zuhail. 2013. *Gelombang ekonomi inovasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal.**

Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. Colaboratifve Governance in TTheory and practice, *Jurnal of public adminitrasion Resersh and teory*, Vol.18.

Emerson, Kirk., Tina Nabatchi& Stephen Balogh. 2012. *Integrative framework for Collaborative Governance, Jurnal of Publik of Adminitrasion Resarch and Theory*, Vol. 22.

[https://www.iiste.org/journals/?gclid=EAIaIQobChMI7eWiOeKgAMVH pJmAh2htOWpEAAYASAAEgJub\\_D\\_BwE](https://www.iiste.org/journals/?gclid=EAIaIQobChMI7eWiOeKgAMVH pJmAh2htOWpEAAYASAAEgJub_D_BwE). Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 10 :05.

Fairuza, Mia. 2017. Kaloborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada sector Pariwisata (studi Kasus Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Kebijakan dan manajemen Publik*. Volume 5, Nomor 3. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp>. Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 09 :03

Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. 2017. “Buku Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang”. Diakses pada 15 November 2018. <https://barenlitbang.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/2017-Buku-Ekraf-Sub-Sektor-Kuliner-Kota-Malang.pdf>. Diakses pada 28 Desember 2022 pukul 22: 29.

Widiyastuti, I. (2019). Tata Kelola Insitusi, Teknologi dan Manusia: Bagaimana Pemerintah Daerah Menangani Komponen Smart City (Intitutional, tecnlogy, and Humand Governance Manage the Smart City Componens. *Jurnal iptekom: jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi*, 21 (2), 93. <https://doi.org/10.33164/iptekom.21.2.2019.93-108>.Diakses pada 28 Desember 2022 pukul 00 :45.